

OPEN ACCESS

Citation: Widodo, S. (2023).
Pengaruh Pendapatan Transfer Pusat, Pendapatan Asli Daerah dan Pembiayaan Daerah Terhadap Belanja Modal Daerah Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia. *Jurnal Budget: Isu dan Masalah Keuangan Negara*, 8(1), 71-84

Received: March 31, 2023
Revised: June 7, 2023
Accepted: June 9, 2023
Published: June 2023

© The Author(s)



This work is licensed under a
[Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

Artikel

PENGARUH PENDAPATAN TRANSFER PUSAT, PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN PEMBIAYAAN DAERAH TERHADAP BELANJA MODAL DAERAH PADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DI INDONESIA

The Effect of Central Transfer Revenues, Local Original Revenues, and Local Financing on Local Capital Expenditures in Municipalities/Cities Governments in Indonesia

Slamet Widodo

Pusat Analisis Anggaran dan Akuntabilitas Keuangan Negara,
Badan Keahlian Setjen DPR RI,

email: eswidodo263@gmail.com

Abstract

The purpose of this journal is to analyze the influence of central transfer revenues, regional original revenue, and regional financing on the allocation of regional capital expenditure in 503 regency/city governments in the period of 2008-2021. The low allocation of local government capital expenditure is one of the factors for conducting this research. The data used is the realization value of the Regional State Budget (APBD) for the period 2008-2021. The methodology used is a fixed effect panel data regression model. The benefit of this study is to improve the quality of regional development planning to increase regional economic self-sufficiency for both central and local governments. The results show the fixed effect model is the best model, and PAD, PTP, and PBY variables significantly affect capital expenditure.

Keywords: Regional Original Revenue (PAD), Central Transfer Revenue (PTP), Regional Capital Expenditure (BM)

JEL Classifications: H54; H71; H72; H77; E62.

I. PENDAHULUAN

Salah satu tujuan dari otonomi daerah adalah memberikan keleluasaan daerah dalam mengelola perekonomiannya sesuai dengan karakteristik dan potensi yang dimiliki daerah. Pelimpahan kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah berdampak pada meningkatnya urusan daerah yang semula dikendalikan sepenuhnya oleh pemerintah pusat. Bertambahnya kewenangan daerah ini tentunya dibarengi dengan alokasi dana transfer ke daerah yang bersumber dari APBN yang bertujuan agar daerah dapat lebih mandiri secara ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah. Peningkatan ekonomi daerah sering dikaitkan dengan ketersediaan akses infrastruktur yang menunjang kegiatan ekonomi di daerah. Karenanya, alokasi belanja modal yang dianggarkan dalam APBD menjadi wujud komitmen daerah dalam meningkatkan perekonomian daerah dan meningkatkan kemandirian daerah.

Belanja modal memiliki peran penting dalam pembangunan infrastruktur dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah (Syafira & Triani, 2021). Melalui belanja modal, pemerintah daerah dapat membiayai pembangunan infrastruktur, seperti jalan, jembatan, gedung, dan fasilitas umum lainnya, yang akan meningkatkan konektivitas antarwilayah dan memudahkan akses masyarakat terhadap layanan publik. Selain itu, belanja modal juga dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan menyediakan fasilitas publik yang memadai, seperti tempat rekreasi, lapangan olahraga, dan fasilitas kesehatan.

Salah satu sumber belanja modal adalah Transfer ke Daerah (TKD) dalam bentuk dana perimbangan yaitu Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), serta dana transfer lain yang bersifat *mandatory* seperti Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan dan Dana Desa. Dalam pos Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), komponen ini masuk dalam akun Pendapatan Transfer Pusat (PTP) yang menjadi salah satu sumber penerimaan daerah yang berasal dari pemerintah pusat untuk mendanai urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah. Selain itu, daerah juga memiliki sumber penerimaan lainnya yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari kegiatan ekonomi di daerah, seperti pajak, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan lain-lain. Dibandingkan PTP, PAD merupakan sumber pendapatan yang paling fleksibel dan mudah diatur pengelolaan atau alokasinya oleh pemerintah daerah, sesuai dengan kebutuhan dan kondisi daerahnya. PTP diberikan kepada pemerintah daerah untuk membiayai tugas dan fungsinya dalam menyediakan pelayanan publik dan pembangunan daerah. Pengalokasian dana perimbangan diberikan sesuai dengan perhitungan yang berdasarkan pada kriteria tertentu, seperti luas wilayah, jumlah penduduk, proporsi pembagian antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, tingkat kemahalan konstruksi, karakteristik daerah tertentu dan lain-lain. Proporsi rata-rata dana perimbangan terhadap total pendapatan pemerintah daerah periode 2008-2021 yang sebesar 79 persen, menunjukkan pemerintah daerah sangat mengandalkan transfer dana dari pemerintah pusat.

Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemerintah daerah dituntut untuk dapat mengelola belanjanya secara efektif. Pembangunan ekonomi daerah tidak hanya tercermin dari meningkatnya pembangunan infrastruktur tapi juga bagaimana daerah dapat secara efektif memenuhi kebutuhan dasar masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, pengentasan kemiskinan, penyediaan perumahan, pekerjaan dan lain-lain. Di sisi lain, pemerintah daerah juga harus memastikan roda pemerintahan/birokrasi daerah dapat berjalan secara efektif dan efisien untuk tujuan peningkatan layanan kepada masyarakat.

Meningkatnya kebutuhan pemerintah daerah ini tentunya berdampak pada besaran alokasi belanja modal di daerah. Kurangnya kemampuan daerah dalam mengoptimalkan pendapatan daerahnya melalui PAD, seringkali menjadi salah satu faktor rendahnya alokasi belanja modal daerah. Meskipun kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah belum signifikan, namun PAD berkontribusi dalam meningkatkan alokasi belanja modal daerah. Hasil penelitian Hartiningsih dan Halim (2015) menunjukkan bahwa pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah secara simultan berpengaruh terhadap belanja modal. Keterbatasan sumber daya keuangan daerah dapat membatasi kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai belanja modal yang dibutuhkan untuk pembangunan infrastruktur dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah daerah seringkali bergantung pada transfer pemerintah pusat untuk membiayai belanja modal.

Besaran proporsi alokasi belanja modal daerah juga menjadi bagian dari pertimbangan pemerintah pusat dalam pengalokasian transfer ke daerah. Karenanya, sejak tahun 2018, pemerintah telah mewajibkan pemerintah daerah untuk mengalokasikan 25 persen dari Dana Transfer Umum (DAU dan DBH) untuk belanja infrastruktur. Belanja infrastruktur itu difokuskan untuk peningkatan layanan publik dan ekonomi dan diharapkan berdampak pada peningkatan kesempatan kerja, penurunan kemiskinan dan kesenjangan penyediaan layanan publik antar daerah. Namun demikian, belum optimalnya daerah dalam mengelola pendapatan yang bersumber dari kegiatan ekonomi daerah, menyebabkan masih tingginya ketergantungan alokasi belanja modal yang berasal dari pendapatan transfer pusat dan pembiayaan daerah. Berdasarkan pada uraian pentingnya belanja modal bagi perekonomian daerah tersebut di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis seberapa besar pendapatan transfer pusat, pendapatan asli daerah dan pembiayaan daerah memengaruhi alokasi anggaran belanja modal daerah.

Sejak tahun 2018, pemerintah telah mewajibkan pemerintah daerah untuk mengalokasikan 25 persen dari Dana Transfer Umum (DTU), yaitu mencakup Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH), untuk belanja infrastruktur. Laporan atas kewajiban pemenuhan 25 persen DTU tersebut harus disampaikan kepada pemerintah pusat paling lambat tanggal 31 Januari 2018. Apabila daerah tidak menyampaikan laporan atau tidak memenuhi ketentuan tersebut, pemerintah menerapkan sanksi berupa penundaan penyaluran DAU dan DBH. Namun demikian masih banyak provinsi dan kabupaten/kota yang belum memenuhi ketentuan tersebut. Berdasarkan laporan yang masuk ke Kementerian Keuangan, pada tahun 2017 terdapat 313 daerah (14 provinsi, 299 kabupaten/kota), dan di tahun 2018, terdapat 288 daerah (11 provinsi, 277 kabupaten/kota) yang menganggarkan kurang dari 25 persen DTU untuk belanja infrastruktur.

Secara tidak langsung hal ini mencerminkan pemerintah daerah belum optimal dalam mengelola pendapatannya yang berdampak pada semakin meningkatnya ketergantungan daerah terhadap dana transfer dari pemerintah pusat. Menteri Keuangan (Kontan, 2018) menyatakan tingkat ketergantungan APBD terhadap dan transfer pemerintah pusat bahkan mencapai 80,1 persen. Sementara kontribusi PAD masih rendah, hanya sekitar 12,87 persen. Ironisnya, tingkat ketergantungan ini semakin parah pada pemerintah kabupaten/kota yang menjadi titik berat otonomi daerah.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya mengenai pentingnya belanja modal dalam meningkatkan perekonomian daerah, pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, ditemukan beberapa masalah sebagai berikut:

1. pemerintah daerah belum sepenuhnya mengalokasikan belanja modal sesuai dengan ketentuan pemerintah;.
2. pemerintah daerah belum optimal dalam mengelola pendapatan daerah yang tercermin dari masih rendahnya kontribusi PAD dalam APBD; dan
3. ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana transfer dari pemerintah pusat masih tinggi.

Berdasarkan pada rumusan masalah tersebut di atas, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar pendapatan transfer pusat, pendapatan asli daerah dan pembiayaan daerah memengaruhi anggaran belanja modal daerah, serta untuk menganalisis sejauh mana kemandirian daerah dan ketergantungan daerah terhadap sumber pendanaan dari pemerintah pusat dalam periode tahun 2008-2021. Hasil penelitian ini diharapkan dalam menjadi referensi bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan belanja daerah. Secara umum hasil penelitian ini juga dapat membantu pemerintah pusat dalam merumuskan kebijakan transfer ke daerah untuk mewujudkan tujuan otonomi daerah menuju ke kemandirian ekonomi daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah. Bagi peneliti dan masyarakat, hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai referensi dalam mengkritisi kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam turut memajukan kepentingan daerah.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Pembangunan infrastruktur yang dibiayai dari belanja modal daerah dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Infrastruktur yang memadai dapat meningkatkan aksesibilitas, memperlancar mobilitas, dan meningkatkan produktivitas masyarakat. Beberapa penelitian mengenai pengaruh belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi antara lain penelitian Nurmainah (2013) yang mengambil data penelitian tahun 2003-2012. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belanja modal pemerintah daerah berpengaruh signifikan dan mempunyai hubungan yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah. Selain itu, beberapa penelitian lainnya juga mengungkapkan hal yang serupa. Penelitian Awandari & Indrajaya (2016) menyatakan bahwa infrastruktur dapat membuka lapangan kerja baru, meningkatkan pelayanan publik, dan membuka kesempatan usaha baru. Hal tersebut dapat terwujud melalui perencanaan yang seksama untuk memastikan manfaat jangka panjang proyek pembangunan infrastruktur bagi kesejahteraan masyarakat. Perencanaan tersebut meliputi pemilihan proyek yang tepat, pengelolaan yang efektif dan transparan, serta pemerataan manfaat antar wilayah.

Pemilihan proyek infrastruktur yang tepat antara lain dapat diukur dari kebermanfaatannya dalam mendukung perekonomian daerah seperti pembangunan jalan tol, listrik dan air bersih. Hasil penelitian Panama dkk (2019) terkait dengan pengaruh pembangunan infrastruktur pada berbagai bidang (jalan, listrik, air, pendidikan, dan kesehatan) di 8 kabupaten/kota di Kawasan utara Provinsi Jawa Timur menunjukkan adanya pengaruh yang positif antara infrastruktur air, listrik, pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi sementara pada bidang lainnya tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Sebagai sumber pendapatan terbesar dalam APBD, pendapatan transfer pusat menjadi salah satu sumber bagi daerah dalam mengalokasikan belanjanya, khususnya belanja modal. Berbagai studi juga mengungkapkan adanya pengaruh besarnya alokasi PTP terhadap alokasi belanja modal, sebagai berikut:

1. Pasa dkk (2023) melakukan penelitian yang menganalisis pengaruh PAD dan Dana Transfer terhadap belanja modal serta dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan di Kota Bitung. Penelitian menggunakan analisis jalur dengan sumber data sekunder dari BPS Kota Bitung dalam periode tahun 2010 – 2022. Hasil penelitian menunjukkan secara langsung pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Dana transfer tidak berpengaruh terhadap belanja modal secara langsung.
2. Oktaviani (2018) melakukan penelitian terkait pengaruh pinjaman daerah, pendapatan asli daerah terhadap kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi daerah 21 kab/kota di Jawa Tengah dalam periode tahun 2010-2015. Penelitian menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Ditjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu yang diolah menggunakan data panel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pendapatan asli daerah tidak memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dan variabel pinjaman daerah berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.
3. Penelitian Sari dkk (2018) mengenai menunjukkan bahwa secara simultan variabel dana perimbangan, dana SiLPA dan PAD secara bersama-sama (simultan) berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.
4. Penelitian yang dilakukan oleh Mulyani (2016) mengenai pengaruh pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum terhadap belanja modal pemerintah pada 26 pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2015. Penelitian yang menggunakan pendekatan analisis deskriptif dan metode korelasi sederhana menunjukkan bahwa ada hubungan yang kuat dan positif antara PAD dan belanja modal. DAU yang memiliki hubungan positif dengan PAD menunjukkan bahwa semakin tingginya DAU yang diterima daerah akan meningkatkan belanja modal daerah.
5. Penelitian Pane dkk (2021) mengenai pengaruh PAD dan dana perimbangan terhadap belanja modal pada pemerintah kabupaten/kota di Sumatera Utara juga menunjukkan adanya hubungan signifikan PAD dengan belanja modal, sementara dana perimbangan yaitu DAU tidak memiliki pengaruh terhadap belanja modal.

Sumber belanja modal juga dapat berasal dari pembiayaan daerah. Pembiayaan daerah dalam APBD terdiri dari penerimaan pembiayaan yang berasal dari SILPA tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah dan obligasi daerah dan penerimaan kembali pemberian pinjaman. Sementara pengeluaran pembiayaan terdiri dari penyertaan modal (investasi) daerah, pembentukan dana cadangan, pembayaran pokok utang, pemberian pinjaman daerah, pembayaran kegiatan lanjutan dan pengeluaran perhitungan pihak ketiga. Dengan demikian pembiayaan daerah dalam rangka menutup defisit APBD merupakan selisih dari penerimaan pembiayaan dikurangi dengan pengeluaran pembiayaan. Beberapa hasil penelitian terkait pengaruh pembiayaan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi sebagai berikut:

1. Penelitian Angreini dkk (2022) menganalisis pengaruh PAD dan pembiayaan terhadap belanja modal di Provinsi Sumatera Selatan menggunakan metode kuantitatif dengan menggunakan analisis regresi linier berganda. Data sekunder diperoleh dari laporan keuangan pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan. Peneliti memilah variabel pembiayaan daerah ke dalam penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Hasil penelitian menjelaskan bahwa variabel PAD, variabel pendapatan transfer, variabel lain-lain pendapatan daerah yang sah, variabel penerimaan pembiayaan dan variabel pengeluaran pembiayaan secara simultan berpengaruh signifikan dan positif terhadap variabel belanja modal kabupaten/kota.

2. Penelitian Oktaviani (2018) terkait pengaruh pinjaman daerah, pendapatan asli daerah terhadap kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi menunjukkan bahwa pinjaman daerah berpengaruh signifikan baik terhadap kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi, sedangkan PAD berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan namun tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.
3. Penelitian Pika dkk (2018) terkait pengaruh PAD, SILPA, pinjaman daerah terhadap realisasi belanja modal pada kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan menunjukkan bahwa pinjaman daerah tidak berpengaruh positif terhadap realisasi belanja modal yang mengindikasikan bahwa kebutuhan belanja daerah pada tahun tersebut tidak tergantung pada pinjaman daerah.

Dari beberapa penelitian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pertumbuhan ekonomi daerah tidak hanya disokong oleh pengelolaan pendapatan dan pembiayaan daerah yang optimal, namun juga melalui komponen belanja daerah dalam bentuk belanja modal. Mengingat pentingnya belanja modal bagi peningkatan ekonomi daerah, maka perlu dianalisis lebih lanjut bagaimana pengaruh PAD, pendapatan transfer pusat dan pembiayaan daerah terhadap kemampuan daerah mengalokasikan belanja modal.

III. METODOLOGI PENELITIAN

1. Jenis Penelitian dan Data

Penelitian ini menggunakan analisis kuantitatif. Data sekunder yang digunakan untuk penelitian ini adalah data realisasi APBD yang mencakup 503 pemerintah kabupaten/kota di Indonesia dalam periode tahun 2008-2021. Data yang dianalisis adalah data mencakup jumlah PAD, data jumlah akumulasi pendapatan transfer pusat (mencakup DAU, DAK, DBH, Dana Keistimewaan, dan Dana Otsus), jumlah pembiayaan daerah yang merupakan selisih dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan dan jumlah belanja modal pemerintah daerah dalam jutaan rupiah. Data-data tersebut diolah menggunakan metode data panel. Data realisasi APBD diperoleh dari publikasi BPS (statistik keuangan pemerintah kabupaten/kota) dan Kementerian Keuangan (portal data APBD).

2. Teknik Analisis Data

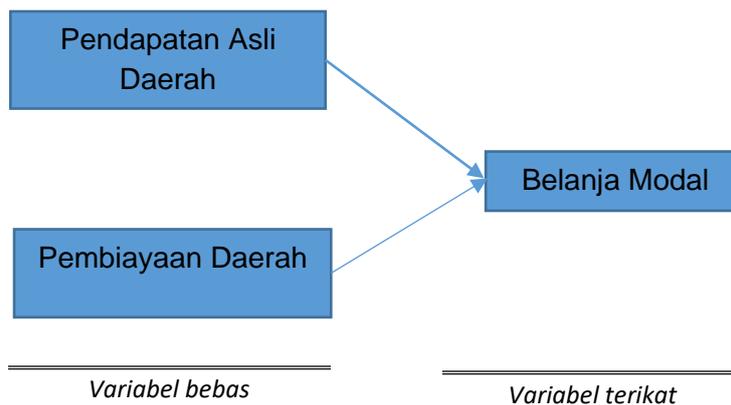
Persamaan hubungan antara variabel PAD, PTP dan PBY terhadap BM dapat digambarkan sebagai berikut:

$$BM_{it} = a + \beta_1 PAD_{it} + \beta_2 PTP_{it} + \beta_3 PBY_{it} + \varepsilon_i$$

Keterangan :

- BM = Belanja Modal Daerah
- PAD = Pendapatan Asli Daerah
- PTP = Pendapatan Transfer Pusat
- PBY = Pembiayaan Daerah
- β_1 - β_3 = Koefisien
- i = *cross-section*
- t = *time series*
- ε_i = *error term*

Model penelitian adalah sebagai berikut:



Model persamaan dalam penelitian ini merupakan pengembangan model persamaan yang telah dilakukan oleh Pasa dkk (2023), Sari dkk (2018), dan Pane dkk (2021) dengan memperluas/menambahkan basis data secara nasional mencakup 503 kabupaten/kota di Indonesia dalam periode tahun 2008-2021.

Hubungan antara variabel terikat (BM) terhadap variabel bebas (PAD, PTP, dan PBY) dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Hubungan pendapatan asli daerah dan belanja modal.

PAD merupakan salah satu sumber pendapatan daerah, yang antara lain berasal dari pajak dan retribusi daerah. Pemerintah daerah dapat menggunakan PAD untuk mendanai belanja modal dalam rangka membiayai proyek pembangunan infrastruktur. Namun, besarnya belanja modal tergantung pada jumlah PAD yang diperoleh daerah. Jika PAD yang diperoleh relatif tinggi, pemerintah daerah dapat mengalokasikan lebih banyak anggaran untuk belanja modal. Sebaliknya, jika PAD rendah, pemerintah daerah memiliki keterbatasan anggaran untuk meningkatkan alokasi belanja modalnya.

- b. Hubungan pendapatan transfer pusat dan belanja modal

Jika pemerintah daerah menghadapi keterbatasan pendapatan (seperti PAD yang rendah), dana perimbangan atau pendapatan transfer pusat dapat menjadi penopang untuk membiayai belanja modal yang dibutuhkan untuk meningkatkan kapasitas daerah dan ekonomi daerah. Pada akhirnya, peningkatan ekonomi daerah tercermin melalui peningkatan pajak dan retribusi daerah.

- c. Hubungan pembiayaan daerah dan belanja modal.

Sumber pembiayaan daerah antara lain berasal dari SILPA Tahun Anggaran sebelumnya dan pinjaman daerah. Penggunaan SILPA untuk belanja modal dilakukan dalam rangka menutupi defisit APBD yang salah satunya disebabkan oleh meningkatnya alokasi belanja modal daerah. Sedangkan pemanfaatan pinjaman daerah dapat secara langsung untuk membiayai proyek pembangunan infrastruktur daerah. Sumber pinjaman daerah dapat berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, atau lembaga/institusi lain. Mekanisme pinjaman daerah tunduk pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Sesuai dengan kerangka konseptual di atas dan hasil penelitian terdahulu, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Secara parsial, diduga pendapatan asli daerah

berpengaruh terhadap belanja modal, diduga pendapatan transfer pusat berpengaruh terhadap belanja modal, diduga pembiayaan daerah berpengaruh terhadap belanja modal, dan terakhir secara simultan diduga pendapatan asli daerah, pendapatan transfer pusat, dan pembiayaan daerah berpengaruh terhadap belanja modal.

Dalam penelitian ini, analisis dilakukan dalam dua tahapan yaitu

- a. Analisis statistik deskriptif dan perilaku data mencakup i) rasio ketergantungan pemerintah kabupaten/kota; ii) rata-rata PAD, PTP, belanja modal dan pembiayaan daerah berdasarkan pulau; iii) rata-rata proporsi belanja modal terhadap APBD kabupaten/kota, dan; iv) rata-rata belanja modal, PAD, dan PTP. Gambaran perilaku data ini menjadi basis dalam menentukan model persamaan di atas untuk dianalisis dengan menggunakan teknik analisis data panel.
- b. Analisis regresi data panel untuk memilih model terbaik dan melalui serangkaian uji dan menentukan persamaan untuk diinterpretasi lebih lanjut. Tahapan analisis regresi data panel diawali dengan pemilihan model terbaik melalui pendekatan *Common Effect Model (CEM)*, *Fixed Effect Model (FEM)* dan *Random Effect Model (REM)*. Melalui serangkaian uji (*Chow-test*, *Hausman-test*, *LM-test*), maka ditentukan model terbaik. Analisis regresi dengan data panel adalah metode yang menggabungkan antara data *cross section* dan *time series*. Data ini dikelompokkan secara *cross section* pada periode waktu tertentu, dan memakai tiga metode yaitu *pooled least square*, *fixed effect* dan *random effect* untuk mengestimasi parameternya. Analisis regresi data panel ini digunakan untuk mengidentifikasi pengaruh PAD, PTP dan pembiayaan daerah terhadap belanja modal daerah. Pemilihan model terbaik dilakukan melalui model estimasi awal yang dilanjutkan dengan serangkaian uji yaitu uji *Chow-test*, uji *Hausman Test* dan uji *Lagrange Multiplier Test*. Berdasarkan pada uji tersebut, maka terpilih ***Fixed Effect Model*** sebagai model terbaik.

Selanjutnya, berdasarkan model tersebut dilakukan uji asumsi klasik, yaitu uji kolinearitas dan uji heteroskedastisitas. Uji kolinearitas menunjukkan nilai seluruh variabel bebas berada di bawah 0,80 yang artinya dalam model tersebut tidak terjadi korelasi antar variabel bebasnya. Langkah selanjutnya adalah uji heteroskedastisitas untuk mengetahui ada tidaknya penyimpangan asumsi klasik heteroskedastisitas atau adanya ketidaksamaan varian dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi data panel. Dalam uji ini, variabel PTP tidak lolos uji heteroskedastisitas, sehingga semua variabel bebas dan terikat ditransformasi ke dalam bentuk logaritma natural untuk mengurangi fluktuasi data yang berlebih agar lolos uji heteroskedastisitas. Grafik residual model persamaan yang telah ditransformasi dalam bentuk logaritma natural menunjukkan nilainya berada di bawah batas (500 dan -500), yang artinya varian residual sama. Oleh karenanya, tidak terjadi gejala heteroskedastisitas atau lolos uji heteroskedastisitas (Napitupulu et al., 2021).

Setelah melalui serangkaian uji tersebut di atas, maka diperoleh persamaan yang selanjutnya dilakukan uji terhadap keseluruhan model (uji F) dan uji parsial (uji T), dan dilakukan interpretasi dan analisis atas model persamaan tersebut.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menganalisis data realisasi APBD di 503 pemerintah kabupaten/kota dalam periode tahun 2009-2021. Berdasarkan pada statistik deskriptif (Tabel 1) dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 1. Statistik Deskriptif

	PAD	PTP	PBY	BM
Mean	194.857,10	915.868,80	115.990,40	253.337,40
Median	70.357,45	793.929,10	66.686,34	199.241,90
Maximum	5.381.920,00	5.418.024,00	3.347.899,00	4.750.207,00
Minimum	414,79	61.664,02	- 613.152,70	123,90
Std. Dev.	380.661,60	514.442,50	180.378,10	216.087,00
Skewness	5,34	1,88	5,00	4,91
Kurtosis	45,06	9,61	46,03	55,13
Jarque-Bera	540.729,90	16.615,51	560.255,10	807.830,00
Probability	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Sum	1.340.000.000	6.310.000.000	799.000.000	1.750.000.000
Sum Sq. Dev.	998.000.000.000.000	1.820.000.000.000.000	224.000.000.000.000	322.000.000.000.000
Observations	6.892	6.892	6.892	6.892

Sumber: BPS, diolah

Berdasarkan tabel output uji statistik deskriptif di atas yang mendeskripsikan data penelitian ini dengan jumlah observasi 6.890, diketahui bahwa:

1. Variabel PAD memiliki nilai terkecil Rp414,79 juta dan nilai maksimum sebesar Rp5.381.920,00 juta, dengan nilai rata-rata (*mean*) sebesar Rp194.857,10 juta dan standar deviasi sebesar Rp380.661,60 juta.
2. Variabel PTP memiliki nilai terkecil Rp61.664,02 juta dan nilai maksimum sebesar Rp5.418.024,0 juta, dengan nilai rata-rata (*mean*) sebesar Rp915.868,80 juta dan standar deviasi sebesar Rp514.442,50 juta.
3. Variabel PBY memiliki nilai terkecil sebesar minus Rp613.152,70 juta dan nilai maksimum sebesar Rp3.347.899,00 juta, dengan nilai rata-rata (*mean*) sebesar Rp115.990,40 juta dan standar deviasi sebesar Rp180.378,10 juta.
4. Variabel BM memiliki nilai terkecil sebesar Rp123,90 juta dan nilai maksimum sebesar Rp4.750.207,00 juta, dengan nilai rata-rata (*mean*) sebesar Rp253.337,40 juta dan standar deviasi sebesar Rp216.087,00 juta.

Berdasarkan pada variabel PAD, PTP, PBY, dan BM dalam realisasi APBD tersebut di atas, dapat diambil gambaran data mencakup 1) rasio ketergantungan pemerintah kabupaten/kota; 2) rata-rata PAD, PTP, belanja modal dan pembiayaan daerah berdasarkan pulau; 3) rata-rata proporsi belanja modal terhadap APBD kabupaten/kota, dan; 4) rata-rata belanja modal, PAD, dan PTP.

1. Rasio Ketergantungan Pemerintah Kabupaten/Kota Tahun 2008-2021.

Rasio Ketergantungan menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana eksternal. Semakin tinggi rasio ketergantungan, berarti tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal (terutama pemerintah pusat dan provinsi) semakin tinggi, dan sebaliknya. Tinggi rendahnya rasio ketergantungan juga menggambarkan tinggi rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam perekonomian daerah yang tercermin

melalui pembayaran pajak dan retribusi daerah yang merupakan salah satu komponen utama PAD. Semakin tinggi pajak dan retribusi daerah menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang semakin meningkat. Rumus yang digunakan untuk menghitung rasio ketergantungan adalah:

$$\text{Rasio Ketergantungan} = \frac{\text{Pendapatan Transfer Pusat}}{\text{Total Pendapatan}} \times 100\%$$

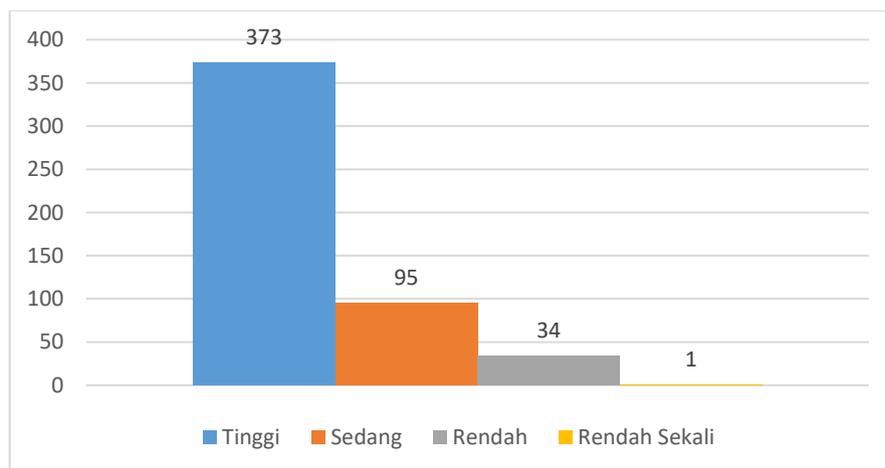
Berdasarkan hasil perhitungan rasio tersebut, dapat digambarkan pola hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Tabel 2).

Tabel 2. Pola Hubungan dan Tingkat Kemandirian Daerah

Kemampuan Keuangan	Kemandirian (%)	Pola Hubungan
Rendah Sekali	0% - 25%	Instruktif
Rendah	25% - 50%	Konsultatif
Sedang	50% - 75%	Partisipatif
Tinggi	75% - 100%	Delegatif

Sumber : DJPK, Kemenkeu RI

Berdasarkan data rasio ketergantungan 503 pemerintah kabupaten/kota tahun 2008-2021, sebanyak 373 pemerintah daerah memiliki ketergantungan yang tinggi, 95 pemerintah daerah dalam kategori sedang, 34 pemerintah daerah dalam kategori rendah, dan hanya 1 pemerintah daerah yang masuk kategori rendah sekali (Gambar 1).



Gambar 1. Rerata Rasio Ketergantungan Kabupaten/Kota Tahun 2008-2021

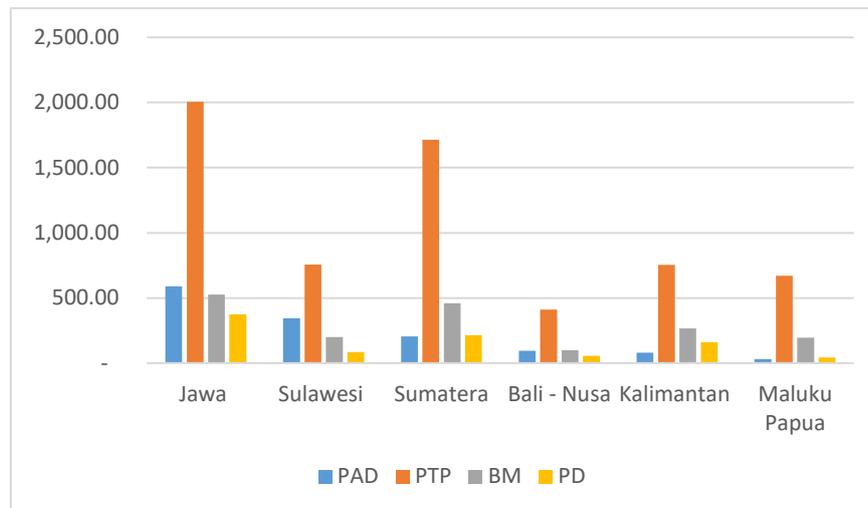
Sumber: BPS, diolah

Rendahnya PAD dan keterbatasan keuangan pada pemerintah daerah menjadi salah satu kendala sulitnya daerah faktor utama yang menyebabkan ketergantungan pemerintah daerah pada transfer dari pemerintah pusat dalam mendanai belanjanya, terutama belanja modal. PAD merupakan sumber pendapatan utama bagi pemerintah daerah, namun kenyataannya masih banyak daerah di Indonesia yang belum berhasil meningkatkan PAD-nya secara signifikan. Hal ini menyebabkan rasio ketergantungan pemerintah daerah terhadap pendapatan transfer pusat masih tinggi.

2. Rata-rata PAD, PTP, BM dan Pembiayaan Daerah Berdasarkan Pulau.

Kontribusi PAD sebagian besar berada di pulau Jawa, Sulawesi dan Sumatra yang menyumbang 84,8 persen (Gambar 2). PTP (transfer ke daerah) masih terkonsentrasi di Pulau Jawa dan Sumatera yang menyumbang sebesar 58 persen. rata-rata pemerintah

kabupaten/kota di Pulau Jawa, Sumatera dan Kalimantan mengalokasikan belanja modal yang lebih besar ketimbang pemerintah daerah di pulau lainnya.

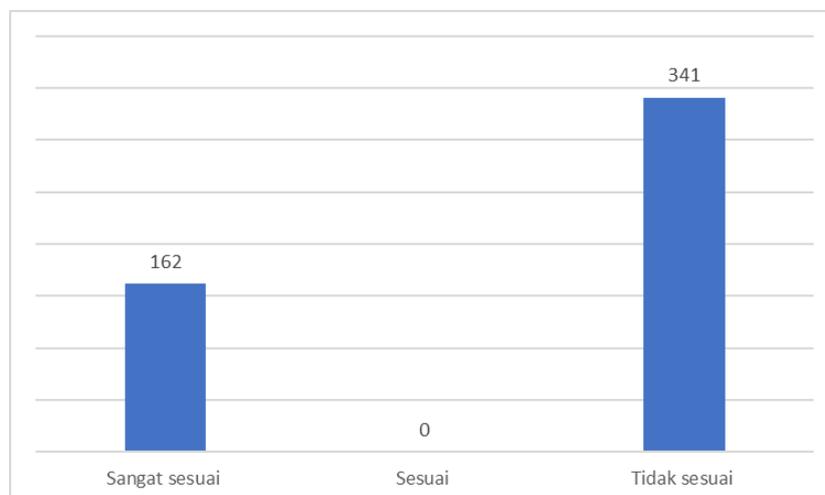


Gambar 2. Jumlah Rata-rata PAD, PTP, Belanja Modal dan Pembiayaan Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota berdasarkan Pulau, Tahun 2008-2021

Sumber : BPS, diolah

3. Rata-rata Proporsi Belanja Modal Terhadap APBD Kabupaten/Kota.

Data rasio belanja modal terhadap belanja daerah dalam periode tahun 2008-2021 masih rendah dan belum sesuai dengan ketentuan pemerintah. Dari 503 kabupaten/kota, sebanyak 341 pemda mengalokasikan belanja modal di bawah 25 persen, dan sebanyak 162 daerah mengalokasikan di atas 25 persen (Gambar 3).



Gambar 3. Rerata Kesesuaian Rasio Belanja Modal Terhadap Belanja Daerah Pemerintah Kab/Kota, 2008-2021

Sumber: BPS, diolah

Berdasarkan pada gambaran data APBD di 503 pemerintah kabupaten/kota tahun 2008-2021 di atas, maka perlu dilakukan analisis lebih lanjut mengenai pengaruh PAD, PTP dan pembiayaan daerah terhadap alokasi belanja modal pemerintah daerah.

Hasil regresi data panel terhadap persamaan model tersebut di atas diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 2. Hasil Regresi Data Panel

Uji F-stat		Uji T		Adjusted R-squared
F-Statistic	P-value	Variabel	Prob.	
20.72859	0.00000	PAD	0.0000	0.636246
		PTP	0.0000	
		PBY	0.0000	

Sumber: BPS, diolah

Setelah melalui serangkaian uji tersebut di atas, maka diperoleh persamaan sebagai berikut:

$$BM = -0.74 + 0.07*PAD + 0.8*PTP + 0.11*PBY + [CX=F]$$

Hasil regresi linear berganda data panel menunjukkan bahwa :

- a. Variabel PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap BM.

PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap BM, jika PAD meningkat sebesar 1 persen, maka BM meningkat sebesar 0,07 persen. Hal ini sejalan dengan penelitian Sari dkk (2018) dan Pasa dkk (2023). Hal ini tentunya tergantung pada besar kecilnya PAD dan tujuan alokasi belanja modal tersebut. Belanja modal yang diwujudkan dalam bentuk pembangunan jalan raya, jembatan, dan infrastruktur layanan publik dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja dan mengurangi kemiskinan akan berdampak pada meningkatnya PAD seiring dengan peningkatan perekonomian daerah. Sementara belanja modal yang diinvestasikan untuk membangun kantor pemerintahan, rumah peribadatan, tidak secara signifikan berpengaruh pada peningkatan PAD.

- b. Variabel PTP berpengaruh positif dan signifikan terhadap BM

PTP berpengaruh positif dan signifikan terhadap BM, jika PTP naik 1 persen, maka BM meningkat sebesar 0,8 persen. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Sari dkk (2023), namun berbeda dengan hasil penelitian Pane dkk (2021) yang menyatakan alokasi Dana Transfer tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Sebagian komponen dana transfer pusat seperti DAU sebagian besar dialokasikan untuk belanja aparatur daerah. Masih tingginya ketergantungan daerah terhadap dana transfer pusat dan masih rendahnya kemampuan daerah dalam mengelola pendapatannya menunjukkan bahwa sumber belanja modal daerah masih sangat bergantung pada besaran alokasi transfer pemerintah pusat kepada daerah.

- c. Variabel PBY berpengaruh positif dan signifikan terhadap BM

PBY berpengaruh positif dan signifikan terhadap BM, jika PBY naik 1 miliar, maka BM meningkat sebesar 0,11 persen. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Ariyanto dan Utama (2020) yang menyatakan bahwa pembiayaan daerah, dalam hal ini pinjaman daerah, berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal. Pemerintah daerah dituntut untuk lebih inovatif dalam membiayai pembangunan infrastrukturnya, antara lain dengan melakukan pinjaman daerah dalam rangka menutup defisit anggaran dalam rangka pembiayaan prioritas pembangunan. Sepanjang tata kelola pinjaman daerah dilakukan secara profesional dan transparan, maka defisit anggaran yang diakibatkan oleh meningkatnya belanja modal dapat menghasilkan output yang lebih bermanfaat dalam mendorong perekonomian daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

V. KESIMPULAN

Berdasarkan pada hipotesis dalam penelitian ini, hasil persamaan regresi menunjukkan hasil bahwa secara parsial variabel PAD, PTP, dan PBY berpengaruh positif dan signifikan terhadap BM. Berdasarkan hasil uji F, seluruh variabel bebas (PAD, PTP dan PBY) secara bersama-sama (simultan) mempengaruhi variabel terikatnya yaitu belanja modal.

Pemerintah harus mulai melakukan pendekatan kebijakan asimetrik untuk pengalokasian transfer ke daerah di masa mendatang mengingat karakteristik daerah yang berbeda tentu akan berdampak pada besaran alokasi yang diberikan oleh pemerintah pusat. Daerah-daerah terisolir, perbatasan, atau daerah dengan kondisi geografis yang sulit tentunya memerlukan dana yang signifikan untuk dapat segera merasakan perbaikan infrastruktur layanan publik. Hal ini dapat dilakukan dengan menetapkan prioritas transfer ke daerah, dan daerah yang membutuhkan seharusnya mendapatkan alokasi yang lebih banyak.

Penelitian ini tentunya tidak terlepas dari berbagai keterbatasan antara lain jumlah sampel dan variabel terikat yang digunakan dalam penelitian ini. Penelitian hanya mengambil variabel PAD, pendapatan transfer pusat, dan pembiayaan daerah pada pemerintahan kabupaten/kota. Karenanya, peneliti menyarankan variabel penelitian dapat ditambah/diperluas untuk melihat pengaruh atau hubungan yang lebih baik antara variabel terikat dengan variabel bebas secara lebih komprehensif.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada para reviewer/mitra bestari yang telah mereview tulisan ini dan kepada tim redaksi Jurnal Budget yang telah memberikan kesempatan berharga kepada penulis.

DAFTAR PUSTAKA

- Angreini, Fitri; Sari, Kartika Kartika & Yevi Dwitayant. (2022). Pengaruh Pendapatan Daerah dan Pembiayaan terhadap Belanja Modal Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan. *Indonesian Journal of Applied Accounting and Finance* 2(1) 2022, 73-86; <https://ejurnal.poliban.ac.id/index.php/IJAAF/article/download/1430/949/4912>
- Awandari, Luh Putu Putri & Indrajaya, I Gst Bgs. (2016). Pengaruh Infrastruktur, Investasi, Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Melalui Kesempatan Kerja. *E-Jurnal EP Unud*, 5(12): 1435-1462; <https://media.neliti.com/media/publications/165388-ID-pengaruh-infrastruktur-investasi-dan-per.pdf>
- Badan Pusat Statistik. (2021). *Statistik Keuangan Pemerintahan Kabupaten/Kota Tahun 2006-2021*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik. (2023). *Statistik Keuangan Pemerintahan Kabupaten/Kota Tahun 2021-2022*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Hartiningsih, Nina, & Halim, Edyanus Herman (2015). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal Di Provinsi Riau. *Jurnal Tepak Manajemen Bisnis*. 7(2). ISSN 1979-3294. Program Magister Manajemen Universitas Riau.

- Kontan. (2018). Menkeu: Ketergantungan APBD Pada Dana Transfer Daerah Sangat Tinggi. Diakses dari <https://nasional.kontan.co.id/news/menkeu-ketergantungan-apbd-pada-dana-transfer-daerah-sangat-tinggi>. Tanggal akses 3 Juni 2023.
- Mulyani, Heni. (2016). The Relationship of Local Own Revenues and General Fund Allocation on Capital Expenditure of Local Government. 2016 Global Conference on Business, Management, and Entrepreneurship, 163–166. <https://doi.org/10.2991/qcbme-16.2016.29>
- Napitupulu et al. (2021). Penelitian Bisnis Tehnik dan Analisis Data dengan SPSS-STATA-Eviews. Edisi I. Medan: Penerbit Madinatera.
- Nurmainah, Santi. (2013). Analisis Pengaruh Belanja Modal Pemerintah Daerah, Tenaga Kerja Terserap Dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Kemiskinan (Studi Kasus 35 Kabupaten / Kota di Provinsi Jawa Tengah). *Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE)*, September 2013, 131 – 141
- Oktaviani, Nur Atika. (2018). Pengaruh Pinjaman Daerah, Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kemiskinan Dan Pertumbuhan Ekonomi Di Jawa Tengah. *Economics Development Analysis Journal*, 305-313.
- Panama, Herlina Yakha; Zuhroh, Idah & Ida Nuraini. (2019). Pengaruh Infrastruktur Pembangunan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Jawa Timur. *Jurnal Ilmu Ekonomi*. 3(3) Juli 2019. <https://doi.org/10.22219/jie.v3i3.9545>
- Pane, Yonson dkk. (2021). Analisis Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Sumatera Utara. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial* 5(2) September 2021. <https://journal.undiknas.ac.id/index.php/fisip/article/download/3182/992>
- Pasa, Serly Rosa; Kawung, George M.V & Ita Pingkan F Rorong. (2023). Analisis Pengaruh PAD Dan Dana Transfer Terhadap Belanja Modal Serta Dampaknya Ke Pertumbuhan Ekonomi Dan Kemiskinan di Kota Bitung. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah Vol 24. No 1 (2023)*; 80-94
- Pika, P., Saiful, S., & Nila Aprila. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran, Pinjaman Daerah Terhadap Realisasi Belanja Modal Sumatera Selatan. *Jurnal Fairness*, 8 (2), 125-140. <https://doi.org/10.33369/fairness.v8i2.15202>
- Sari, N.; Djuanda, G.; & Sarwani. (2018). Pengaruh Dana Perimbangan, Dana Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal dan Dampaknya Pada Pertumbuhan Ekonomi. *Jurnal Riset Manajemen dan Bisnis (JRMB) Fakultas Ekonomi UNIAT Vol.3, No.1, Februari 2018*, 91-100.
- Syafira, DD. dan Triani, M. (2021). Kausalitas Infrastruktur Jalan, Urbanisasi dan Kesejahteraan Masyarakat di Indonesia. *Jurnal Kajian Ekonomi dan Pembangunan* 3(2) (Juni 2021), 54-62. <https://ejournal.unp.ac.id/students/index.php/epb/article/download/13603/5242>